



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 789508/788181-126
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.magelangkab.go.id

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi daerah maupun teknis pelaksanaannya.

Adapun yang melatar belakangi ditetapkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Selain hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.

Beberapa hal yang baru dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 diantaranya perubahan kasifikasi jenis naskah dinas menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus dan naskah dinas lainnya serta penyusunan naskah dinas melalui media rekam elektronik dan pembubuhan tanda tangan elektronik. Permendagri ini juga menambahkan sejumlah hal baru terkait pengaturankewenangan penandatanganan Plt, Plh, Pj dan Pjs. Terdapat pula penambahan perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Kepala Daerah hingga Lurah, perubahan bentuk stempel naskah dinas yang menggunakan logo daerah dan pengaturan kop naskah dinas untuk UPT dan BLUD.

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 maka Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera dilakukan perubahan.

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA



AGUS SULISTIYANTO, S.E, M.M.

Pembina

NIP.198006252005011007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. IDENTIFIKASI MASALAH 1

 C. TUJUAN PENYUSUNAN 1

 D. DASAR HUKUM 2

BAB II 3

POKOK PIKIRAN 3

BAB III 4

MATERI MUATAN 4

 A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 4

 B. RUANG LINGKUP MATERI 4

BAB IV 5

PENUTUP 5

 A. SIMPULAN 5

 B. SARAN 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah. Agar tertib administrasi, lancarnya komunikasi kedinasan, kontroling, efektif dan efisien maka sangat di butuhkan pedoman pengelolaan naskah dinas.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan yang jelas, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Dengan adanya Tata Naskah Dinas maka pengelolaan informasi kedinasan secara tertulis baik secara manual maupun elektronik menjadi lebih tertib, efektif dan efisien.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan pedoman tata naskah dinas bertujuan untuk memberikan pedoman/ acuan dalam penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga tercipta kelancaran komunikasi kedinasan secara tertulis yang efektif dan efisien.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusuna Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2025 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan yang jelas, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Tata naskah dinas digunakan sebagai acuan bagi seluruh pegawai di dalam menyelenggarakan komunikasi kedinasan baik antar orang per orang/ jabatan maupun antar unit kerja, perangkat daerah dan instansi pemerintah. Tanpa ada tata naskah dinas setiap naskah dinas yang disusun pasti tidak akan sama dikarenakan mengikuti/ sesuai dengan selera si pembuat naskah dinas, baik dalam hal format, bentuk dan susunan naskah dinas. Dengan berpedoman dengan tata naskah dinas maka akan terjalin komunikasi kedinasan secara efektif, lancar dan efisien.

Ruang lingkup Tata naskah selain mengatur terkait dengan format, bentuk dan susunan naskah dinas, juga mengatur bagaimana penciptaan naskah dinas, dari membuat, menerima, mendistribusikan sampai dengan mengarsipkan segala bentuk naskah dinas.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Magelang perlu memperbaharui pedoman pengaturan tata naskah dinas yang ada saat ini karena sudah tidak relevan dengan kebijakan terkait dengan Tata Naskah Dinas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini untuk dijadikan pedoman dan pengaturan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari terutama terkait dengan naskah dinas.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi penyusunan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi pengaturan tentang:

1. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
2. Pembuatan Naskah Dinas
3. Pengamanan Naskah Dinas
4. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas
5. Pengendalian Naskah Dinas
6. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kepala daerah menetapkan Raperbup Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang dengan pertimbangan pengaturan tata naskah dinas saat ini sudah tidak sesuai dengan dasar di atasnya. Penetapan Peraturan ini diharapkan dapat mendorong lancarnya komunikasi kedinasan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari.

B. SARAN

Dalam penetapan raperbup pedoman penyusunan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang disarankan agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas